

**BAB III**  
***BARGAINING POSITION TIONGKOK DALAM PERDAGANGAN***  
**INTERNASIONAL**

Perdagangan merupakan tujuan yang dekat dengan negara-negara maju. Barang-barang mahal dan mewah terkenal dengan produksi dari negara elit Eropa maupun Amerika yang tidak lain mereka sebagai negara maju. Negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara lainnya pasti memiliki ciri khas dari barang yang dijual. Dimana, negara-negara tersebut sudah memiliki pelanggan sendiri didunia. Di era globalisasi seperti sekarang, semua negara boleh ‘unjuk gigi’ di dunia internasional yang dulunya hanya di dominasi oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Tiongkok merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang mulai memajukan ekonomi domestik dengan perdagangannya di dunia internasional. Kedatangan Tiongkok dalam perdagangan internasional berdampak pada negara negara pendahulunya yang merasa tersaingi oleh Tiongkok dalam barang dagangannya.

Dewasa ini, Tiongkok menjadi salah satu negara super power baru dan Tidak berlebihan jika memang Tiongkok mendapatkan predikat tersebut. Di era saat ini ekonomi merupakan ‘harga mati’ bagi sebuah negara, tak heran jika ekonomi dianggap sebagai harga diri sebuah negara dan selalu menjadi isu utama dalam setiap kepentingan. Ekonomi adalah raja sekarang bukan hanya di berlaku di Asia saja tetapi dengan perkembangan globalisasi ekonomi merupakan raja bagi setiap negara di dunia.

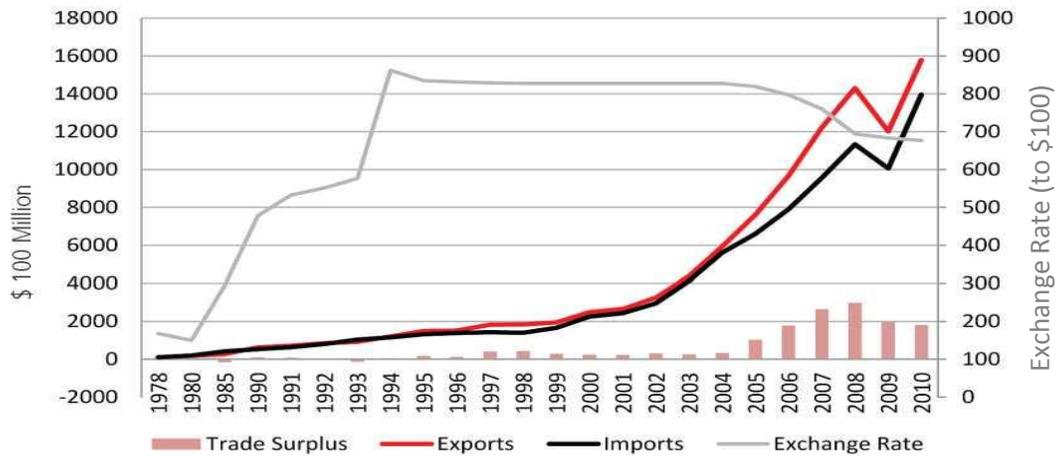
Dari setiap detik perkembangan maupun penurunan neraca perekonomian di setiap negara tidak akan terlepas dari pada pengaruh globalisasi. Menurut David Held dalam bukunya yang berjudul *Global Transformation: politics, economics and culture*, bahwasannya globalisasi dicirikan dengan perluasan, menjadi lebih dalam, dan percepatan keterhubungan (*interconnectedness*) seluruh dunia dalam berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari budaya ke kriminalitas sampai ke finansial dan spiritual. Meskipun globalisasi sendiri tidak memiliki definisi yang baku, globalisasi sendiri dapat diartikan sebagai proses (atau sejumlah proses) yang memuat transformasi di dalam pengaturan spasial dari relasi-relasi dan transaksi social- dinilai menurut luas cakupan, kedalaman, kecepatan, dampak yang terkena globalisasi – yang menggerakkan aliran (*flows*) antar benua atau region dan jaringan aktivitas, interaksi, dan pemanfaatan kekuatan (David Held, 2001).

#### **A. Perdagangan Tiongkok**

Sebelum tahun 1978, Tiongkok melakukan perdagangan dengan negara-negara di dunia. Dengan cara mengekspor bahan baku dan manufaktur sebagai langkah untuk menutupi pembayaran atas impor mineral dan bahan produksi yang tidak tersedia di negara ini. Adanya strategi pembangunan ekonomi dibalik kebijakan reformasi pada periode itu, membuat Tiongkok mau membuka hubungan yang lebih luas terkait dengan perdagangan antar negara, baik bilateral maupun multilateral (Xiaojun Li, 2012).

Li (2012) dalam tulisannya juga menjelaskan bahwa jumlah impor dan ekspor Tiongkok sepanjang tahun 80-an meningkat tajam. Walaupun peningkatan ekspor-impor tidak merata, namun Tiongkok mempunyai strategi dalam substitusi impor yang dijalankan sehingga mampu mempromosikan produksi industri lokal. Yang nantinya, bisa menciptakan impor dan ekspor secara merata di Tiongkok. Ekspor Tiongkok mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari pada impor di tahun 1980 hingga tahun 1983, yang menyebabkan perdagangan Tiongkok mengalami surplus di tahun-tahun tersebut. Perdagangan Tiongkok diprediksi selama enam tahun ke depan akan melonjak di sektor impor dikarenakan meluasnya cadangan devisa negara, pengelolaan perdagangan luar negeri yang terdesentralisasi, dan pembelian pabrik serta peralatan asing untuk industri dalam negeri Tiongkok. Untuk mengurangi dampak dari defisit produksi akibat meluasnya cadangan devisa negara, maka serangkaian kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok, diantaranya sistem perizinan impor dan ekspor, kontrol ketat terhadap pengeluaran valuta asing, dan devaluasi bertahap dari Renminbi yang lebih dari 60 % selama dekade ini (lihat Gambar 3-0-1 ).

**Gambar 3.1. China's Trade and Exchange Rate (1978-2010)**



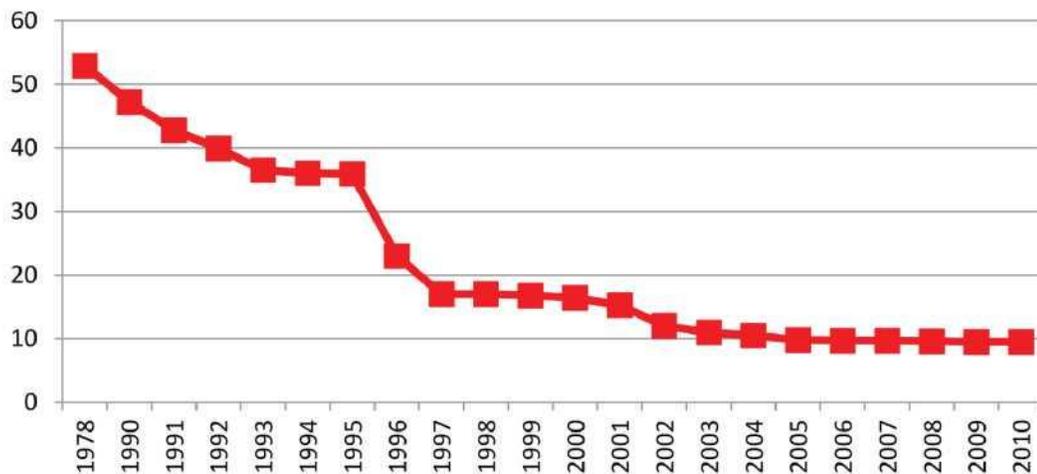
Source: (Xiaojun Li, 2012)

Bisa dikatakan bahwa reformasi perdagangan Tiongkok secara keseluruhan pada tahun 80-an, lebih fokus terhadap proses perubahan pada sistem Tiongkok yang terpusat. Liberalisasi perdagangan yang dilakukan secara bertahap menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dilihat dari peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto), perdagangan dan investasi asing Tiongkok. Pada akhir tahun 80-an, perdagangan Tiongkok mencapai \$115,5 miliar atau sebesar 24% dari PDB Tiongkok dan 3% dari total perdagangan di dunia, yang kemudian menempatkan Tiongkok sebagai negara dagang terbesar ke-16 di dunia.

Dengan berbagai bentuk reformasi dalam bidang perpajakan, perbankan, nilai tukar, dan manajemen devisa di tahun 1990, mempengaruhi volume perdagangan Tiongkok. Terdapat dua aspek yang memberi kontribusi besar dalam hal ekspansi ekspor-impor, yaitu pertama, dihilangkannya sistem nilai tukar dua jalur pada tahun 1994 dan menciptakan persamaan nilai mata uang Tiongkok dengan berpatokan pada

dolar AS, dengan menurunkan nilai Renminbi sebesar 44% dari tahun sebelumnya. Selama 11 tahun ke depan nilai tukar Renminbi tetap stabil bahkan memberikan keunggulan yang bersifat kompetitif bagi ekspor Tiongkok yang kemudian memicu munculnya kritik dari negara lain yang menurut mereka ada unsur manipulasi mata uang, karena murahnya ekspor Tiongkok. Kedua, adanya keterlibatan Beijing dalam serangkaian pemotongan tarif secara sukarela di lebih dari 5.000 produk, yang mana penurunan tarif rata-rata berkisar dari 47,2% di tahun 1990 menjadi 15,8% pada tahun 1999, hal inilah yang kemudian membuka jalan bagi masuknya sejumlah tawaran terutama dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kepada Tiongkok untuk bergabung dengan mereka ( Lihat Gambar 3-0-2).

**Gambar 3.2. China's Average Tariff Rate (1978-2010)**



Source: (Xiaojun Li, 2012)

Terlepas dari intervensi yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan situasi ekonomi dan krisis keuangan di Asia pada tahun 1990-an hingga 1997, pertumbuhan impor dan ekspor Tiongkok meningkat sebesar 14% -16% dan mencapai

\$474,3 miliar di tahun 2000, sehingga menempatkan Tiongkok di urutan keenam dalam peringkat perdagangan global.

Pada tanggal 11 November 2001, Tiongkok secara resmi bergabung dengan WTO sebagai anggota ke-143 dalam institusi ekonomi multilateral yang telah menguasai lebih dari 90% dari total perdagangan global. Dalam kesepakatan Tiongkok dan WTO, Tiongkok berjanji untuk menawarkan akses pasar kepada anggota WTO dalam sektor pertanian, manufaktur dan layanannya dengan menurunkan hambatan tarif, menghapus langkah-langkah nontarif, peraturan perundang-undangan dan tindakan terkait perdagangan lainnya sesuai dengan peraturan WTO. Bergabungnya dengan WTO memungkinkan Tiongkok untuk sepenuhnya masuk ke dalam pasar global dan mengeluarkan potensinya sebagai kekuatan perdagangan. Akibatnya, antara tahun 2001 sampai 2008, perdagangan Tiongkok mengalami pertumbuhan (lihat Gambar 1) dengan impor dan ekspor keduanya mencapai angka \$1 triliun di tahun 2008.

Pada kongres Rakyat Nasional tahun 2012, PM Wen dalam laporan kerja pemerintahnya menyampaikan bahwa dengan adanya perdagangan luar negeri Tiongkok yang menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya ekonomi negara ini, maka pemerintah perlu untuk memperhatikan permintaan domestic sebagai langkah untuk menunjang perdagangan luar negerinya. Tiongkok merencanakan program Lima Tahun dari tahun 2011-2015 dengan tujuan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan sebesar 10% dalam perdagangan dan mencapai volume perdagangan sebesar \$4,8 triliun pada tahun 2015. Menurut sebuah laporan baru-baru

ini yang disampaikan oleh Citigroup, Tiongkok diperkirakan akan menyusul Amerika Serikat sebagai pedagang terbesar di dunia pada tahun 2015 dan tetap berada di posisi teratas sampai setidaknya 2050 (Xiaojun Li, 2012).

## **B. Foreign Direct Investment Tiongkok**

Selama tiga dekade terakhir, Tiongkok telah berhasil membuat kemajuan dalam hal mengembangkan berbagai kerangka peraturan untuk menarik dan mempromosikan investasi (OECD, 2008). Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini muncul persaingan yang semakin ketat terkait investasi, namun Tiongkok masih menjadi tujuan favorit investor asing dalam berinvestasi.

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam jurnal *Columbia Center on Sustainable International Investment* (Davies, Inward FDI from China and its policy context, 2012) bahwa pada tahun 2010, Tiongkok telah mengakumulasi saham FDI sebesar \$579 miliar, angka ini jauh di atas nilai ekonomi berkembang dan transisi besar lainnya, dan dari tahun 2000 sampai 2010 Tiongkok setiap tahun menerima arus masuk FDI yang lebih besar daripada ekonomi pembangunan atau transisi lainnya.

Selama krisis ekonomi global tahun 2008, penurunan FDI Tiongkok sedikit dibandingkan dengan kontraksi FDI global<sup>3</sup>, sama seperti pada krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998, ketika arus masuk FDI ke Tiongkok mampu bertahan dengan baik sementara negara lain yang terkena dampak krisis mengalami pemasukan arus FDI

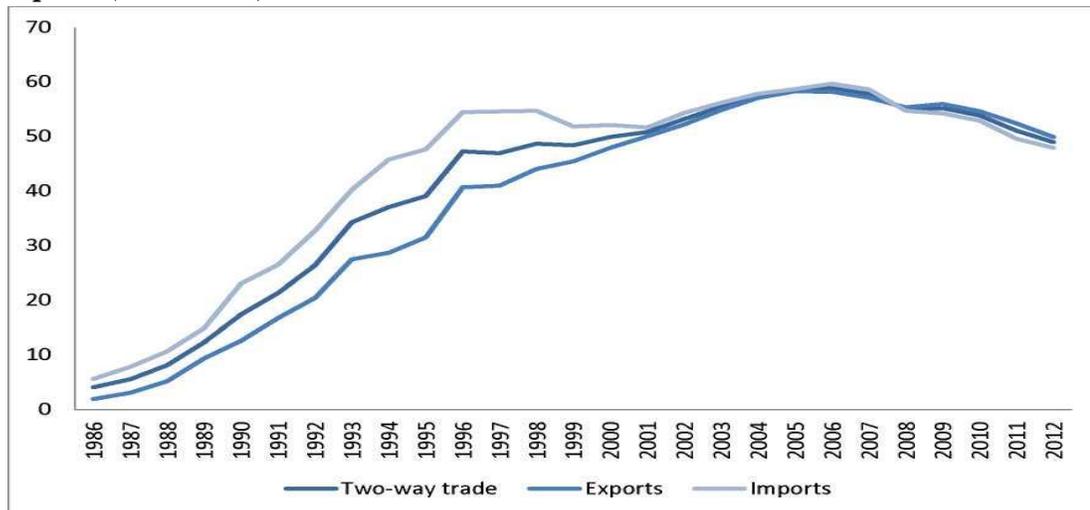
---

<sup>3</sup> FDI Tiongkok naik 11,8% menjadi \$92,4 miliar di tahun 2008, kemudian turun hanya 2,6%, dari \$92,4 miliar menjadi \$90 miliar di tahun 2009 (lihat Lampiran Tabel 1). Sebaliknya, arus FDI global dikontrak oleh 11,5% pada tahun 2008 dan 32% pada tahun 2009 (data UNCTAD FDI, di <http://unctadstat.unctad.org>). Pada tahun 2010, arus masuk FDI Tiongkok pulih sebesar 17,4% sementara arus masuk global - termasuk, Tiongkok naik sebesar 4,9% (sumber yang sama).

yang menurun. Pada tahun 2010, arus masuk FDI ke Tiongkok berangsur stabil, sebesar 17,4% tiap tahunnya mencapai rekor tertinggi sebesar \$105,7 miliar (lihat lampiran 1). Pada tahun 2011, realisasi FDI naik sebesar 11,3% menjadi \$117,7 miliar sebelum turun 3,7% menjadi \$113,3 di 2012 (MOFCOM, n.d.).

Dalam perdagangan luar negeri Tiongkok kita mengenal istilah *Foreign Invested Enterprises* (FIE)<sup>4</sup>. Pada awal periode reformasi bagian FIE dalam perdagangan luar negeri Tiongkok meningkat menjadi 58,5% di tahun 2005, dan menjadi 53,8% di tahun 2010, 51,1% di tahun 2011 serta 49% di tahun 2012 (MOFCOM, n.d.). FIE penting untuk kontributor surplus dalam perdagangan di Tiongkok. Dari tahun 1986 sampai 1997, impor FIE melebihi ekspor FIE. Sejak tahun 1998 dan seterusnya, FIE telah mencatat surplus ekspor yang besar.

**Gambar 3.3. Percentage share of FIE exports and imports in total exports and imports (1986-2012)**



Source: MOFCOM website: [www.fdi.gov.cn](http://www.fdi.gov.cn).

<sup>4</sup> Salah satu dari sejumlah struktur hukum dimana perusahaan dapat berpartisipasi dalam ekonomi asing. FIE cenderung memiliki peraturan pemerintah yang ketat di hampir setiap persimpangan bisnis penting, yang membatasi efisiensi di mana perusahaan asing dapat memperoleh keuntungan dari usaha asing serta jumlah kontrol yang dimiliki orang asing atas FIE.

Pemerintah bisa berpuas diri dengan kenyataan bahwa perusahaan domestik sekarang mampu menaikkan bobot mereka di pasar ekspor, namun yang berkaitan dengan surplus perdagangan perusahaan investasi asing, penghasil mata uang asing khususnya, menurun drastis (Davies, 2013).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi yang di alami Tiongkok, pemerintah akhirnya mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan investasi asing sejak tahun 2008. Pada tahun 2009, MOFCOM mendelegasikan wewenang persetujuan untuk proyek investasi ke kantor provinsi, kecuali dalam kasus yang melibatkan kepentingan nasional dan juga wewenang untuk menyetujui perubahan dalam FIE yang telah ditetapkan dengan persetujuan MOFCOM (Shang Zi Han, Notice of MOFCOM on further enhancement of approval procedures for foreign investment, 2009).

Pada saat yang sama, MOFCOM mengizinkan provinsi Untuk pertama kalinya memeriksa dan menyetujui pendirian perusahaan investasi hingga \$100 juta (Shang Zi Han, 2009). Adapun provinsi yang berada dibawah pengawasan langsung pemerintah pusat, yaitu Beijing, Shanghai, Tianjin, dan Chongqing) tetapi juga untuk kota lapis kedua (Harbin, Changchun, Shenyang, Jinan, Nanjing, Hangzhou, Guangzhou, Wuhan, Chengdu, dan Xi'an) serta Zona Pengembangan Teknologi.

## **C. Kerjasama Tiongkok Dengan ASEAN dan Eropa Dalam Bidang Ekonomi**

### **1. Kerjasama Tiongkok di Kawasan ASEAN**

Pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang dinamis membuat hubungannya dengan negara-negara ASEAN telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang kemudian memuncak dengan dibentuknya Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Tiongkok-ASEAN pada tahun 2002. Di luar perdagangan dan kegiatan ekonomi, kerjasama Tiongkok-ASEAN telah diperluas diberbagai bidang. Dengan demikian, hubungan Tiongkok dengan ASEAN telah mencapai era baru di mana kedua belah pihak telah membentuk kerangka kerja ekonomi, politik dan hukum bagi kerjasama komprehensif mereka. Kerjasama yang lebih erat antara Tiongkok dan ASEAN nyatanya saling menguntungkan secara ekonomi, dan memberi kedua negara keuntungan pertumbuhan ekonomi dan mengkatalisasi proses integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur secara keseluruhan.

Kawasan perdagangan bebas (FTA) mengeluarkan peraturan yang menandai salah satu terobosan paling penting dalam kerjasama ekonomi Tiongkok-ASEAN. Dalam ASEAN sendiri terdapat anggota WTO dan non-WTO yang memiliki hak hukum dan kewajiban yang berbeda. Namun, setelah semua anggota non-WTO dalam ASEAN melakukan akses WTO, aturan yang ditetapkan oleh organisasi internasional ini dapat lebih banyak diterapkan di kawasan ini. Persetujuan Kerangka Kerja merupakan tonggak dalam pengembangan kerjasama ekonomi Tiongkok-ASEAN yang komprehensif dan juga dasar bagi pembentukan Tiongkok-ASEAN Free Trade Area.

Adapun proliferasi dari perjanjian perdagangan bebas di suatu kawasan sering dikenal sebagai “regionalisme perdagangan” yang dalam beberapa dekade terakhir telah menimbulkan tantangan serius bagi sistem perdagangan multilateral dan menimbulkan pertanyaan signifikan dalam hukum internasional. Dalam kawasan Asia Timur, salah satu perkembangan yang paling menonjol dalam regionalisme perdagangan adalah negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara Tiongkok dan ASEAN, yang dikenal sebagai Perjanjian Perdagangan Bebas China-ASEAN (ACFTA).

ACFTA sebagai perjanjian multilateral ditandatangani oleh 11 negara-bangsa. Di mana hal tersebut juga termasuk kewajiban bilateral antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Realitas hukum ini akan memiliki dampak yang mendalam pada penegakan kewajiban perjanjian untuk mekanisme penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan ACFTA (WONG, ZOU, & ZENG, 2006).

Adapun *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) sendiri merupakan kesepakatan yang dilakukan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Tiongkok untuk mewujudkan suatu kawasan perdagangan yang bebas dengan cara menghilangkan dan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik yang terkait dengan tarif ataupun non tarif, terkait dengan peningkatan akses pasar jasa, terkait peraturan dan ketentuan investasi, dan sekaligus juga peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian pihak-pihak yang terlibat dalam ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Tiongkok. *Framework Agreement ASEAN-China FTA* (ACFTA) juga

telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.

Tujuan pembentukan ACFTA sendiri terbagi atas: Pertama, untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota. Kedua, untuk meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi. Ketiga, untuk menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota. Dan keempat, untuk memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (seperti Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.

Berdasarkan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of Tiongkok*, kedua pihak sepakat akan melakukan kerjasama yang lebih intensif di beberapa bidang seperti : Pertanian, IT, Pengembangan SDM, Investasi, Pengembangan Sungai Mekong, Perbankan dan Keuangan, Transportasi, Industri, Telekomunikasi, Pertambangan, Energi, Perikanan, Kehutanan, Produk-Produk Hutan dan sebagainya.

Pemerintah Tiongkok juga telah mengalokasikan dana sebesar USD 10 miliar dibawah Tiongkok-ASEAN *Investment Cooperation Fund* yang bertujuan untuk membiayai proyek-proyek kerjasama investasi utama seperti infrastruktur, energi dan sumberdaya, teknologi komunikasi dan informasi, serta bidang-bidang lainnya

sekaligus untuk menyediakan fasilitas kredit sebesar USD 15 juta untuk mendukung proses integrasi ASEAN dan kerjasama ekonomi dibawah ACFTA untuk lima tahun kedepan (Kemendag RI, 2010).

Dampak dari terbentuknya ACFTA ternyata mampu memberi pengaruh positif bagi kerjasama Tiongkok dengan negara-negara anggota ASEAN tersebut. Hubungan antara Tiongkok dengan Indonesia pasca terbentuknya ACFTA merupakan contoh nyata dimana kedua negara tersebut semakin ‘harmonis’ dalam hubungan bilateralnya.

## **2. Kerjasama Tiongkok di Kawasan Eropa**

Sebagai negara yang sedang berada dalam puncak kejayaan ekonomi, sudah sepantasnya Tiongkok membentangkan sayap ekonominya di benua yang dianggap sebagai benua paling makmur dan modern saat ini yaitu Eropa. Eropa adalah kawasan investasi yang ‘menggiurkan’ bagi negara industri seperti Tiongkok.

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh Tiongkok dengan Uni Eropa diantaranya adalah kerjasama yang bernama *Near Zero Emission Coal*. Kerjasama *Near Zero Emission Coal* melalui teknologi CCS ini dinamakan sebagai kerjasama fungsional dimana kemitraan Uni Eropa dan Tiongkok ini saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama yaitu bumi bersih pada tahun 2020, melalui teknologi yang ditawarkan Uni Eropa dan Inggris, untuk membantu Tiongkok dalam penurunan emisinya.

Terjalannya kerjasama diantara kedua belah pihak berawal ketika mereka sadar dengan kerusakan lingkungan yang banyak disebabkan oleh kegiatan manusia

yang membuat dampak sangat buruk bagi udara dunia, misalnya pembangunan dan industrialisasi serta meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar fosil. Dampak pencemaran lingkungan sebenarnya tidak semata-mata disebabkan oleh karena kegiatan industri dan teknologi saja, namun juga disebabkan oleh faktor lain yang menunjang kegiatan tersebut, yaitu faktor penyedia daya listrik dan faktor transportasi. Faktor penyedia daya listrik dan transportasi, keduanya adalah penyebab terbesar pemakaian bahan bakar fosil, baik berupa batu bara maupun minyak bumi (Wardhana, 1995, p. 28).

Bertambahnya umur bumi yang semakin menua tidak disadari oleh penghuninya. Dimana polusi yang sehari-hari menemani kehidupan kita, rasanya susah sekali kita hidup benar benar sehat di bumi sendiri. Hal tersebut tidak lain akibat dari kerusakan manusia yang terus mengobrak abrik keasrian bumi secara hukum dirinya sendiri dengan dalih terpaksa untuk kelangsungan hidupnya.

Menurut kajian PBB pada tahun 1990-2004, negara maju seperti AS, Jerman, dan Kanada menambah Emisi gas karbon 16 hingga 17 persen, sementara Inggris malah menurunkan emisi sebesar 14 persen. Sedangkan emisi yang di hasilkan Tiongkok meningkat menjadi 47 persen. Tiongkok, sebagai negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, menjadi salah satu sorotan dunia dalam masalah lingkungan yang juga semakin serius, dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya yang berjumlah sangat besar dan pesatnya pertumbuhan industri, Tiongkok memberikan kontribusi yang Cukup besar dalam pengrusakan lingkungan, tercatat Pada tahun 2006, Bahkan di Tiongkok tercatat memiliki 16 kota

paling tercemar di dunia, dan setiap harinya penduduk menghirup udara kotor dan berbahaya (Muhammad Yunus, 2008).

Tiongkok sebagai negara industri sangat lah dekat dengan lingkungan yang tidak sehat. Sebagai negara yang melakukan kontribusi negatif dalam lingkungan sudah seharusnya Tiongkok juga harus bertanggung jawab dengan ‘pemberian’ Emisi gasnya pada dunia, angka 47 persen merupakan hal yang sangat membahayakan bagi dampak yang di lakukan hanya dari satu negara saja. Dari data diatas sangat terlihat memprihatinkan, pasalnya negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman dan Kanada saja hanya menyentuh angka 16 sampai 17 persen saja.

Dengan apa yang telah di akibatkan oleh Tiongkok terhadap lingkungan global, Tiongkok sebagai negara yang besar dan tingkat ekonomi yang semakin meningkat dan penghasil emisi karbon yang tinggi, mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, antara lain dari PBB, di harapkan Tiongkok dapat berkontribusi dalam masalah lingkungan global (Feng Gao, 2005). Tekanan tersebut merupakan hal yang sudah seharusnya dihadapi oleh negara dengan tingkat emisi yang sangat besar tersebut. Tekanan diatas bukanlah satu satunya tekanan yang di hadapi Tiongkok. Pasalnya tekanan kedua datang yang kali ini tekanan datang dari negara-negara Uni Eropa, dimana Connie Hadegaard menyatakan Tiongkok Seharusnya selalu mendukung kesepakatan-kesepakatan yang mengikat, dalam penurunan emisi karbon yang tingkat emisi karbon di Tiongkok telah berada dalam tahap yang mengkhawatirkan (Joshua W. Busby, 2010).

Dari tekanan demi tekanan yang datang kepada Tiongkok dari berbagai lembaga maupun negara dengan apa yang telah dilakukan Tiongkok pada pengaruh negatif emisi terhadap lingkungan global sampai pada akhirnya Departemen Ilmu dan Teknologi Tiongkok dan komisi Uni Eropa menandatangani Nota kesepahaman tentang kerjasama NZEC (*Near Zero Emission Coal*) Teknologi Pembangkit Listrik melalui teknologi CCS (*Carbon Dioxide capture and storage*) pada KTT Uni Eropa - Tiongkok di bawah kepemimpinan Inggris di Uni Eropa pada bulan Desember 2005. Kerjasama yang disepakati kedua belah pihak memiliki tiga fase yaitu fase pertama, pada pembangunan kapasitas dan pra studi kelayakan untuk proyek demonstrasi, fase kedua, pada studi kelayakan proyek demonstrasi, dan fase ketiga, pada pembangunan dan pengoperasian proyek demonstrasi CCS di Tiongkok (European Commission).

Pada saat ini perkembangan ekonomi yang pesat dari Tiongkok merupakan hal yang dapat memicu industrialisasi di negaranya untuk tetap memproduksi bahan-bahan yang akan di ekspor ke berbagai negara. Bukan hanya ekspor yang dilakukan Tiongkok, dengan jumlah masyarakat terbanyak di dunia tidak mungkin Tiongkok bias memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri oleh sebab itu Tiongkok juga mengimpor barang-barang dari Negara lain untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat di Tiongkok yang sangat banyak tersebut.

Seiring dengan perkembangan ekonomi Tiongkok, perkembangan lingkungan Tiongkok juga tambah buruk, yang di akibatkan banyaknya limbah dari pabrik-pabrik di Tiongkok, baik pabrik-pabrik asing maupun pabrik-pabrik milik dalam negerinya sendiri, yang mengakibatkan banyak daerah yang tercemar. Tidak hanya itu,

Tiongkok yang memiliki banyak simpanan batubara, untuk dapat memenuhi setiap pembangkit listrik di Tiongkok. Tiongkok memilih batubara untuk bahan bakar pembangkit listrik di negaranya karena banyak hal-hal yang mendukung, seperti harga yang lebih murah dan mudah didapatkan. Akan tetapi, pada kenyataannya hal tersebut malah tidak berdampak positif, justru pilihan tersebut memiliki dampak yang sangat buruk karena pada saat batubara tersebut dibakar maka akan menghasilkan emisi yang dapat merusak lingkungan, udara dan mengakibatkan udara itu tercemar dan tidak dapat dihirup oleh manusia, karena dapat berdampak sangat buruk bahkan dapat membuat manusia mati karena kanker dan paru-paru yang rusak akibat emisi karbon yang ditimbulkan oleh batubara tersebut.

Masalah-masalah yang ditimbulkan mengundang perhatian dari berbagai pihak, salah satunya dari PBB yang mengharapkan semua negara yang ada di dunia ini berpartisipasi untuk menyelamatkan bumi, kemudian PBB membuat suatu undang-undang yang di sebut sebagai Protokol Kyoto, dimana negara-negara maju meratifikasi Protokol Kyoto, dan harus memenuhi target penurunan emisi yang telah di tetapkan di Protokol Kyoto, jika penurunan emisi tidak dapat di capai, maka negara tersebut akan di kenakan sanksi dari PBB, tidak hanya bagi Negara-negara maju saja yang diwajibkan menurunkan emisi negaranya, tetapi juga bagi negara-negara berkembang, tetapi tidak memiliki target yang ditetapkan. Tidak hanya dari PBB tetapi juga dari dari negara-negara Uni Eropa, yang mengatakan seharusnya ada hukum yang mengikat dalam menjaga lingkungan yang lebih bersih (Joshua W. Busby, 2010).

Pada undang-undang bernama Protokol Kyoto yang didirikan oleh PBB tidak semua ikut berpartisipasi salah satu negara Uni Eropa yaitu Canada mengundurkan diri dari Protokol Kyoto dengan salah satu alasan Tiongkok yang memiliki peningkatan emisi lebih tinggi tidak meratifikasi Protokol Kyoto. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong Tiongkok untuk bekerjasama dengan Uni Eropa, karena Tiongkok melihat bahwa banyak negara-negara dari Uni Eropa yang berperan penting dalam menjaga bumi lebih bersih.

Dari kerjasama yang telah di sepakati tersebut untuk pembangunan teknologi CCS ini, melibatkan banyak aktor-aktor yang berperan dalam pembangunan CCS tersebut, baik dari pihak Uni Eropa, Inggris dan juga Tiongkok untuk menjalankan Fase-fase yang terdapat di dalam MoU kerjasama antara kedua pihak. Dengan kerjasama sedemikian tersebut Tiongkok juga dapat memperlihatkan kepada negara-negara di dunia, bahwa Tiongkok juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan.

Kontrak kerjasama yang ditawarkan oleh Uni Eropa, dapat dilihat bahwa Uni Eropa memiliki perhatian lebih terhadap perubahan iklim yang sangat buruk saat ini yang banyak disebabkan oleh kegiatan manusia seperti dalam teori green politik yang telah menjelaskan bahwa manusia yang memiliki kekuasaan dalam menguasai lingkungan, dengan dapat mempergunakan hal tersebut, dan juga yang sangat berperan penting dalam kerusakan tersebut.

Tetapi dari bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa dengan bantuan dana yang sangat besar terhadap pembangunan teknologi tersebut, maka tidak mungkin jika Uni Eropa dapat membeli penurunan Emisi yang telah diturunkan oleh Tiongkok demi

memenuhi penurunan emisi yang telah ditetapkan oleh Protokol Kyoto terhadap Uni Eropa dan hal tersebut dapat memberi keuntungan terhadap kedua pihak. Jadi, kerjasama yang dilakukan dapat memberikan dampak positif dan keuntungan yang sama besarnya yang dibutuhkan oleh kedua pihak.

Adapun implementasi kerjasama yang terjalin antara Uni Eropa dan Tiongkok adalah:

**a. Tahap Pertama Penerapan Program NZEC (2006-2009)**

Pada fase ini telah dilakukan penelitian kelayakan pembangunan CCS di Tiongkok dan hasilnya, Pada daerah laut Tiongkok Selatan yang termasuk *Pearl River* yang masih produksi gas, yang memiliki banyak kandungan yang tinggi, dan juga masih aktif memproduksi minyak dan masih tetap berlangsung. Semua daerah ini memiliki sumber industri yang sangat signifikan dalam CO<sub>2</sub> (terutama di Guangdong dan di sekitar Shanghai). Dalam pembangunan industri penambahan dan peningkatan produksi batubara dan potensi batubara toliquid tanaman di Tiongkok barat juga akan membuat Ordos Basin yang lebih di prioritaskan untuk evaluasi lebih lanjut. Dan kandungan CO<sub>2</sub> di daerah Subei akan di jadikan percontohan dalam CO<sub>2</sub>-EOR untuk tes injeksi. Alam Tiongkok yang banyak mengandung CO<sub>2</sub> dieksploitasi, sangat berpotensi besar sebagai pembangunan proyek-proyek penyimpanan Tiongkok (Riswanti, 2013).

Dari penelitian dengan melihat proses yang panjang juga yang bertujuan untuk mengetahui bahwa banyaknya CO<sub>2</sub> yang terperangkap selama jutaan tahun, kemampuan untuk memaksimalkan penyimpanan CO<sub>2</sub> akan secara signifikan

meningkat baik di Tiongkok dan di seluruh dunia. Penyelidikan awal yang dilakukan Tiongkok dan negara-negara yang sebelumnya, menunjukkan bahwa teknologi ini sangat cocok untuk pembangunan CCS, yang dipertimbangkan di seluruh dunia dan dengan demikian merupakan peluang yang baik untuk meningkatkan pemahaman jangka panjang dari proses penyimpanan CO<sub>2</sub>. Dan hal ini memungkinkan juga untuk target penyimpanan CO<sub>2</sub> di masa depan.

**b. Tahap Kedua Penerapan Program NZEC (2009-2012)**

Dari tahap pertama diatas sudah menunjukkan bahwa, CCS ini sangat cocok untuk pembangunan di Tiongkok dan telah melewati berbagai proses dan pertimbangan dari kedua belah pihak yang memungkinkan pembangunan di Tiongkok. Pada tahap kedua ini telah berjalan untuk tahap selanjutnya yaitu pada tahap proses pembangunan yang pertama kali di lakukan di Tiongkok yang tepatnya di Bijing, dan masih berlanjut untuk proses pembangunan dan pengoprasian, tetapi pada tahun 2013 ini hasil dan penurunan emisi belum dapat di lihat karena masi dalam tahap proses pengembangan teknologi CCS dari program NZEC (Riswanti, 2013).

Meskipun pada tahun 2013 masih belum menemukan hasil penurunan emisi akan tetapi seperti pada data di atas mengatakan bahwa pada fase pertama mereka melihat adanya potensi bagus dari Tiongkok untuk pembangunan CCS yang semakin memberi tekat kepada kedua belah pihak agar segera melakukan tahap proses pembangunan untuk yang pertama kali. Belum terlihat adanya penurunan emisi dikarenakan teknologi CCS dari program NZEC masih dalam pengembangan.

### **c. Tahap Ketiga Pelaksanaan NZEC (2012-2020)**

Pada tahap ketiga yang terdapat di MoU atau nota kesepahaman, dimana tahap ketiga ini adalah untuk melanjutkan MoU tahap kedua yang dimana pembangunan dan pengoprasianya akan melihat hasil dari pengoprasian teknologi CCS di Tiongkok sebagai proyek percontohan hasil dari teknologi CCS yang nyata dan jika benar berhasil maka akan di kembangkan untuk bertujuan supaya dapat menjalin kerjasama dengan negara-negara lain yang dikenal sebagai negara-negara dengan banyak menyumbangkan emisi untuk lingkungan demi mencapai penurunan emisi pada tahun 2020. Akan tetapi sampai pada tahap ini belum ada hasil dari Penurunan emisi yang di lakukan CCS yang di karenakan teknologi CCS tersebut masih dalam proses pengembangan dan masi berjalan 1 tahun, dan hasilnya nanti akan di ketahui pada tahun 2020.

Adapaun hasil dari pengembangan yang dilakukan di atas akan memberikan laporan penurunan emisi dari teknologi CCS tersebut pada tahun yang sudah di tentukan. Rencana selanjutnya dari teknologi ini akan dapat di gunakan di negara-negara maju maupun negara berkembang karena sangat efektif untuk penurunan emisi karbon dari pembangkit listrik batubara, dan nantinya batubara akan tetap di gunakan untuk pembangkit listrik di setiap negara.

Dari kerjasama Uni Eropa-Tiongkok ini, dapat memberikan keuntungan bagi kedua Negara, dimana Tiongkok dapat menurunkan emisi CO<sub>2</sub> yang sangat mengkhawatirkan, sedangkan Uni Eropa dapat membeli kredit emisinya untuk

memenuhi kredit emisinya di Protokol Kyoto. Sebagai bagian dari berbagai teknologi rendah karbon, CCS dapat memainkan peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, baik untuk Eropa, di mana jaringan hingga 12 proyek percontohan direncanakan, dan di Tiongkok. Uni Eropa dan Tiongkok juga berharap proyek NZEC dapat bertindak sebagai sebuah model untuk proyek-proyek kerjasama teknologi bilateral dan multilateral lainnya dalam konteks perjanjian Kopenhagen UNFCCC. Dalam Protokol Kyoto, negara Annex I dapat membeli kredit emisi dari negara yang berstatus Annex II untuk memenuhi kredit emisinya, hal inilah yang dilakukan oleh uni Eropa dan Tiongkok dengan mematuhi syarat yang ada dalam Protokol Kyoto, dengan menerapkan konsep *Carbon fading* dan CDM.

Program NZEC Di Tiongkok telah berjalan dan pembangunan sedang berlansung di Beijing dalam pembangunan NZEC melalui teknologi CCS, dengan beberapa tahap. Hal ini di sepakati oleh Tiongkok, karena adanya keinginan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak di beberapa kota-kota Tiongkok, program kerjasama yang di sepakati oleh keduanya adalah dalam menurunkan emisi yang disebabkan oleh batubara. Dimana di Tiongkok sangat terkenal dengan batubara yang sangat melimpah dan hasil pembakaran yang disebabkan oleh datubara yang berasal dari pembangkit listrik yang ada di Tiongkok sangat mengkhawatirkan. Maka di bentuklah kerjasama dalam bidang NZEC melalui program CCS atau *Carbon Capture and stronge*. Diman teknologi tersebut di kenalkan oleh Uni Eropa kepada Tiongkok. Uni Eropa memilih Tiongkok karena di Tiongkok memberikan harga yang murah dan tenaga kerja yang murah juga, maka akan memberikan hasil yang banyak

bagi Uni Eropa. Sekaligus memberikan kredit kepada Uni Eropa ketika semua sudah berjalan dan menghasilkan penurunan Emisi. Dengan Teknologi ini dimaksudkan dapat menurunkan Emisi karbon dioksida di Tiongkok demi mencapai penurunan emisi sebesar 40% - 45% pada tahun 2020 (Riswanti, 2013).

#### **D. Tiongkok Accession Dalam Perdagangan Internasional**

Keberhasilan Tiongkok dalam perdagangan di dunia Internasional tidak terlepas dari reformasi ekonominya. Seperti yang dikatakan oleh Zhou (dalam Benewick dan Wingrove), Tiongkok mereformasi ekonominya khususnya di bidang pertanian, kemudian industri dan akhirnya pada seluruh sektor ekonominya pada akhir tahun 1970 (Zhou, 1995). Kemudian pada bulan Maret 1989, pemerintah Tiongkok memperkenalkan 'resolusi terhadap kebijakan industri'. Kebijakan ini sangat penting untuk pembangunan ekonomi karena mengatur kebijakan-kebijakan di sektor industri, seperti industri berteknologi modern, bioteknologi, komunikasi dan transportasi. Hal ini menyebabkan ekonomi Tiongkok telah menjadi ekonomi global dan lebih terbuka terhadap dunia. Reformasi ini juga dapat meningkatkan *Gross National Product* (GNP) Tiongkok sebesar 9% per tahun antara tahun 1979 dan 1992.

Menurut Yang dalam bukunya *Beyond Beijing: liberalization and the regions in Tiongkok*, agenda ekonomi di Tiongkok dapat merubah agenda perekonomian pada tingkat lokal dan pemerintah pusat (Yang, 1997). Perubahan agenda dalam hal ekonomi yang membuat Pemerintah lebih mempunyai kemauan untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta dalam mendorong aktifitas pasar daripada

sebelumnya. Dari perubahan yang dilakukan tersebut berdampak positif yang mana berhasil menciptakan pembangunan perekonomian yang lebih baik tidak hanya untuk sektor swasta saja namun juga untuk wilayah pedesaan termasuk masyarakatnya.

Oleh sebab itu, the OECD menyebutkan bahwa ekonomi Tiongkok cenderung stabil sekitar 9,5% dalam dua dekade terakhir ini (OECD, 2005). Pertumbuhan ekonomi Tiongkok ini sangat turut menyumbangkan penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Keterbukaan ekonomi yang dilakukan Tiongkok telah menjadikannya sebagai bagian dari perekonomian dunia. Situasi ini terjadi karena adanya peran penting reformasi ekonomi di Tiongkok. Sampai pada akhir dimana sektor swasta dapat dengan bebas menanamkan modalnya di banyak sektor industri.

Dalam era saat ini yang begitu maju setiap negara tidak lagi menggunakan tenaga militernya untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya, akan tetapi perdagangan atau ekonomilah yang telah menjadi sumber dari pendapatan ekonominya. Negara yang kurang akan pengalamannya dalam perdagangan internasional lambat laun akan menjadi negara miskin yang minim pendapatan nasionalnya. Ditambah lagi apabila negara minim pengalaman tersebut tidak memiliki sumber daya yang cukup, maka negara tersebut akan menjadi sasaran mudah negara-negara tersebut.

Seperti halnya negara-negara di Afrika, yang memiliki wilayah yang sangat luas. Akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan ekonomi yang kuat, ditambah Afrika merupakan negara tandus yang minim sekali sumber daya alamnya, tak heran jika Afrika merupakan sasaran empuk bagi negara-negara Amerika, Eropa, Tiongkok

bahkan negara berkembangpun seperti Indonesia sudah lama mengincar Afrika sebagai pelabuhan perekonomiannya.

Adanya peran globalisasi sebagai penghubung antara pasar domestik ke pasar global membuat perpindahan barang, jasa, dan teknologi semakin cepat dan mudah. Oleh sebab itu negara-negara produksi seperti Tiongkok sangat merasa diuntungkan dengan globalisasi itu sendiri, contoh sederhananya adalah ketika Tiongkok memproduksi buku sekolah dasar dari salah satu lembaga produksi kecil yang berada di Tiongkok tetap dapat bisa baca oleh anak sekolah dasar di seluruh belahan dunia. Maka dari itu negara-negara yang terkenal akan kemampuan untuk bisa memproduksi barang dengan jumlah banyak ditambah dengan sumber daya dan pengalaman yang mengimbangi seperti Tiongkok akan semakin makmur.

### **1. Pengaruh Tiongkok Dalam Pembentukan AIIB**

Pengaruh Tiongkok di seluruh dunia tidak hanya diperkuat dalam kekuatan angkatan lautnya saja. Sebagai negara industri besar tak heran jika Tiongkok terus memperkuat kekuatan ekonominya melalui kegiatan perdagangan. Dalam memperkuat ekonominya Tiongkok juga membentuk bank yang diberi nama *Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB)*.

Tujuan dari pembentukan AIIB adalah pertama, untuk mendukung konektivitas, integrasi, dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan serta meningkatkan daya saing negara-negara Asia. Kedua, untuk memenuhi gap dalam pembiayaan infrastruktur yang tidak dapat dipenuhi oleh Bank Pembangunan Multilateral lain (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2014).

Bagi Amerika Serikat, terbentuknya AIIB ini sangat kental dengan kepentingan Tiongkok dalam bentuk politik internasional. Tak hanya itu, pembentukan AIIB juga dianggap bernuansa geopolitis yang menjadikan AIIB sebagai kekuatan lunak sebagai strategi untuk menyaingi hegemoni Amerika Serikat sebagai ‘penguasa’ World Bank dan IMF selama ini.

Dengan terbentuknya AIIB sebagai Bank baru membuat Amerika Serikat khawatir akan posisinya sebagai negara yang dianggap sebagai negara adikuasa tersebut. Oleh karenanya, Amerika Serikat mendesak negara-negara sekutunya yang berada di seluruh dunia tidak terkecuali negara Jepang, Korea Selatan, Australia dan negara-negara sekutu tradisionalnya di Eropa untuk tidak terlibat apapun kedalam AIIB. Kekhawatiran Amerika Serikat tersebut karena dengan terbentuknya AIIB oleh Tiongkok tersebut nantinya akan menyaingi *Asian Development Bank* (ADB) dan bahkan *World Bank* yang telah lama dikuasainya.

Benar saja apa yang di khawatirkan Amerika Serikat menjadi kenyataan. Dukungan berdirinya AIIB dari negara-negara Eropa pun berdatangan terhadap Tiongkok. Negara – negara eropa tersebut yaitu Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Swiss dan Luksemburg mengatakan siap untuk bergabung dalam Bank yang bermodal 50 miliar Dolar Amerika Serikat tersebut yang rencananya fokus untuk pembiayaan infrastruktur.

Dukungan kepada AIIB semakin menguat ketika *Asian Development Bank* (ADB) bersama dengan IMF memberitahukan bahwa mereka ikut serta bergabung dengan AIIB. Australia sebagai salah satu negara yang siap gabung dengan AIIB

karena menurutnya AIIB akan sangat bermanfaat untuk negaranya. Nilai investasi sebesar US\$ 2,3 miliar siap dikeluarkan oleh Australia jika negara tersebut jadi bergabung. Negara seperti Korea Selatan dan Jepang juga siap dengan pertimbangan AIIB agar dapat menjamin mekanisme yang terpercaya dalam pemberian pinjaman ketika mereka menjadi anggota AIIB.

Dari penjelasan diatas merupakan bukti bahwa pembentukan AIIB sangat didukung oleh banyak negara. Negara – negara tersebut memberikan dukungannya karena Tiongkok diyakini mampu untuk mencapai pembangunan ekonomi dan mampu berkontribusi besar pada pembangunan global. *World Bank* yang menempatkan Amerika Serikat sebagai ‘supir’ daripada *World Bank* tersebut berdampak juga akan kalah populer oleh AIIB dikarenakan lembaga ini tidak ada hak istimewa seperti yang berlaku pada *World Bank* yang di dominasi Amerika Serikat tersebut. Tidak adanya hak istimewa terhadap negara anggota karena semua anggota AIIB ikut berpartisipasi dalam segala pengambilan keputusan sampai mendapatkan hasil yang bersifat *win-win solution*.

Meskipun AIIB dianggap sebagai strategi ‘ambigu’ untuk menyebarkan kekuatan lunak Tiongkok karena Tiongkok sendirilah yang menggagas berdirinya AIIB, tetapi diyakini bahwa AIIB tidak akan menjadi milik Tiongkok. Karena, negara – negara non-Asia hanya memiliki total 25% dari saham AIIB, yang artinya lebih rendah dari jika dibandingkan dengan saham mereka yang berada di ADB.

Dengan bergabungnya negara-negara sekutu Amerika Serikat ke dalam *Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB)* merupakan salah satu hal yang menunjukkan

‘kemenangan’ Tiongkok di dunia internasional dalam persaingan di bidang ekonomi (Humphrey Wangke, 2015, pp. 5-6).

AIIB sendiri memiliki 57 anggota pendiri, Lebih dari separuh anggota ADB telah bergabung dengan AIIB dan hanya dua anggota ADB Eropa sejauh ini belum bergabung yaitu Belgia dan Irlandia. Menurut dari pada pejabat AIIB sendiri, sekitar 25 negara tambahan diperkirakan akan bergabung pada 2017 (David Pilling, 2017).

**Tabel 3.1. Negara-negara Anggota AIIB**

Region	As of January, 2017	Countries
Southeast Asia (10)		Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
Northeast Asia (3)		China, Mongolia, South Korea
South Asia (6)		Bangladesh, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka
Australasia (5)		Australia, New Zealand
Central Asia (9)		Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Uzbekistan
Middle East (9)		Israel, Iran, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates
Africa (2)		Egypt, South Africa
Europe (19)		Austria, Denmark, Finland, France, Georgia, Germany, Iceland, Italy, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom
South America (1)		Brazil
Others (1)		Hong Kong

Source: AIIB website (Weiss, 2017).

Negara-negara yang tercantum diatas menunjukan bahwa kepercayaan terhadap bank baru yang dipelopori Tiongkok direspon baik oleh banyak negara di seluruh

kawasan di dunia, negara-negara besar di kawasan Asia, Eropa bahkan Amerika pun memutuskan untuk bergabung dengan AIIB.

Akan tetapi dengan berdirinya AIIB menuai perdebatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurutnya negara yang akan ‘menunggangi’ Bank baru ini bisa mempengaruhi ekonomi global, khususnya kawasan Asia Pasifik. Kecurigaan Amerika Serikat terhadap Tiongkok yaitu AIIB merupakan senjata lunaknya Tiongkok yang sengaja didirikan sebagai upayanya untuk mengambil alih *World Bank* dan ADB di wilayah kawasan Asia Pasifik. Seperti yang diketahui *World Bank* dan ADB telah lama didominasi oleh Amerika Serikat. Strategi Amerika Serikat supaya negara-negara Eropa mempertimbangkan atas keputusannya untuk menjadi anggota AIIB, Amerika Serikat mengisyaratkan kekhawatiran dari aspek pembiayaan serta standar operasional AIIB yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan isu yang meluas tentang AIIB tersebut, Tiongkok memberikan argumennya bahwa AIIB di bentuk dalam rangka implementasi konsep jalur sutera bahkan AIIB didirikan dengan mengambil pelajaran dari *World Bank* dan ADB. Sejak dibentuknya, AIIB sukses menarik minat lebih dari 20 negara Asia, termasuk diantaranya negara ASEAN dan semakin diperkuat dengan bergabungnya negara-negara sekutu Amerika Serikat.

Selanjutnya, dari pembentukan *Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB)* serta persaingan Amerika Serikat dengan Tiongkok di dalamnya Humphrey Wangke berpendapat, lembaga perbankan seperti IMF dan World Bank akan mulai kehilangan kepeloporan yang memberi kesejahteraan dunia dengan banyaknya negara-negara

Eropa yang bergabung dengan AIIB. Serta dengan kesediaan negara-negara zona Eropa berkerjasama atau bermitra dengan Tiongkok merupakan wujud pengakuan bahwa Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dunia yang secara eksplisit telah mendapat pengakuan internasional. Kesediaan mereka bermitra dengan Tiongkok dengan menjadi anggota AIIB akan menyebabkan masalah diplomatik mereka dengan Amerika Serikat. Akan tetapi negara-negara Eropa tersebut tampaknya sudah melihat fakta yang terjadi bahwa hanya Tiongkok yang mempunyai kemampuan untuk menggalang dana infrastruktur yang diperkirakan akan mencapai US\$ 8 triliun. Dengan banyak negara yang bergabung dengan AIIB merupakan ungkapan rasa frustrasi mereka atas Amerika Serikat yang tidak kunjung meratifikasi reformasi IMF. Jack Lew yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat mengaku bahwa penundaan ratifikasi kesepakatan ini melemahkan kredibilitas dan pengaruh Amerika Serikat. Oleh karenanya, Amerika Serikat menegaskan tidak akan menghalang-halangi negara-negara lain untuk bergabung dengan Bank baru tersebut (Humphrey Wangke, 2015, pp. 7-8).

Sebagai contoh pengaruh AIIB terhadap negara ASEAN, dapat kita lihat manfaat yang di dapat negara-negara berkembang dalam keikutsertaan mereka di dalam AIIB, khususnya Indonesia.

Pada November 2014 lalu, Indonesia resmi bergabung dalam keanggotaan AIIB. Penandatanganan MoU AIIB dilakukan oleh Menteri Keuangan di kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta. Dari sini Indonesia bersama dengan sembilan negara ASEAN lain beserta Bangladesh, India, Kazakhstan, Kuwait, Mongolia,

Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, dan RRT menyatakan diri untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur kawasan.

Berdasarkan laporan Kemenkeu, penandatanganan MoU antara Indonesia dan AIIB ini disaksikan langsung oleh Duta Besar RRT untuk Indonesia yang turut berperan sebagai saksi. Tujuan bergabungnya Indonesia sendiri memiliki fungsi strategi karena AIIB dipastikan mampu membantu negara-negara anggotanya dalam proses pembangunan. Bantuan yang dimaksud yaitu berbagai pembiayaan infrastruktur yang tidak diberikan oleh bank lain seperti telekomunikasi, transportasi, logistik dan energi, serta sanitasi dan air bersih yang mana akan disediakan oleh AIIB (Marketeers Editor, 2014).

Dilihat dari segi investasi saham, Australia menempati peringkat pertama sebagai negara yang menyumbang dana sebesar US\$ 800 miliar, sedangkan Indonesia termasuk dalam negara yang memberikan sumbangan dana dalam saham AIIB. Tiongkok menyediakan kurang lebih US\$ 30 miliar dari modal utama AIIB yang mencapai US\$ 100 miliar. Indonesia sendiri berinvestasi sebesar US\$ 672,1 juta yang akan dibayar dalam kurun waktu 5 tahun. Dengan begitu Indonesia berada pada urutan ke-8 sebagai pemegang saham terbesar di AIIB (Icha Thahara Yusuf, 2015).

Pada Mei 2016, Indonesia menjadi yang pertama melakukan panggilan untuk pinjaman dana ke AIIB. Terdapat tiga proposal yang diajukan pemerintah Indonesia kepada AIIB sebagai proses peminjaman dana. Pertama, terkait dengan proyek Trans-Sumatera. Pihak AIIB menyampaikan bahwa langkah konkrit dari pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan untuk menindaklanjuti proposal proyek Trans-Sumatera

yang mana akan dibiayai oleh AIIB. Kesiapan teknis pada proyek merupakan kunci dalam memberi pinjaman. Kedua, proyek Pembangkit Listrik (program 35.000mW). Dan ketiga, Operasi Bendungan. Proyek Bendungan berada di bawah kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek ini direncanakan akan berjalan pada tahun 2017-2022 dengan tujuan utama untuk merehabilitasi 63 bendungan dan mengembangkan regulasi keamanannya (Deandra Syarizka, 2016).

## **2. WTO dan Reformasi Ekonomi Tiongkok**

Pada tanggal 11 Desember 2001, Tiongkok resmi bergabung sebagai anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia atau yang dikenal dengan WTO. Keanggotaan Tiongkok menandai langkah besar negara ini untuk memperdalam reformasi pasar bebas. Dalam kurun waktu 21 tahun, Tiongkok telah beralih dari isolasi era Mao Zedong agar lebih terintegrasi dengan masyarakat global.

Di akhir tahun 1970-an, Deng Xiaoping memprakarsai reformasi ekonomi yang membuka ekonomi Tiongkok ke pasar dunia. Terlepas dari Deng Xioping, Tiongkok berusaha untuk bergabung sebagai anggota WTO yang dimulai pada tahun 1986, ketika Tiongkok pertama kali menyatakan ketertarikannya untuk mengikuti *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) sebagai WTO terdahulu. Dalam kurun waktu satu setengah dekade berikutnya, Tiongkok menjadi eksportir utama global dan merupakan magnet bagi investasi asing langsung. Tiongkok akan menjadi kekuatan utama ekonomi di WTO, dikarenakan Tiongkok merupakan negara terbesar ketiga secara geografis dengan memiliki 1,2 miliar populasi terbesar di dunia dan menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

Saat ini, Tiongkok mengalami banyak perubahan. Di Beijing utara sampai sepanjang pantai ke selatan Guangzhou, Tiongkok muncul sebagai kekuatan industri besar. Bukti keterbukaan ekonomi Tiongkok terhadap dunia terlihat jelas dalam pelayanan serta sektor industri. Misalnya, warga Tiongkok bisa menikmati KFC, Wal-Mart dan bahkan gerai Starbucks yang notabennya merupakan produk negara lain.

Sektor pertanian Tiongkok telah banyak dikenai pajak untuk membiayai program industrialisasi intensif di negara tersebut sudah lebih dari 50 tahun. Langkah-langkah liberalisasi yang diperkenalkan pada tahun 1980-an secara signifikan meningkatkan otonomi dan pendapatan petani. Namun, produktivitasnya terbilang rendah dan kesenjangan regional tetap bertahan karena tekanan investasi dan populasi yang kurang aktif. Akibatnya, reformasi pertanian berkelanjutan yang terus-menerus hingga menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan social, diantaranya :

- a. Teknologi dan struktur biaya produksi pertanian tidak kompetitif secara internasional;
- b. Perpecahan perkotaan-pedesaan juga memicu migrasi besar-besaran ke kota-kota, menyebabkan ketegangan demografi, infrastruktur, dan sosial yang signifikan di seluruh wilayah Tiongkok; dan,
- c. Produksi eksploitatif menyebabkan penipisan sumber daya yang cepat dan degradasi ekologi.

Berikut merupakan perjanjian agrikultur yang dikeluarkan WTO, yaitu:

- a. Penurunan tarif dari tingkat rata-rata 22% menjadi 17% dan penetapan kuota tarif;
- b. Liberalisasi hak perdagangan untuk hak pertanian yang memberi akses langsung dari perusahaan asing ke konsumen Tiongkok; dan,
- c. Komitmen untuk tidak menggunakan subsidi ekspor, dan untuk membatasi serta mengurangi subsidi domestik tertentu, kecuali kebijakan pendukung pertanian dalam negeri tertentu yang tidak terkait langsung dengan kebijakan perdagangan.

Adapun dampak dari perjanjian di atas terhadap ekonomi Tiongkok, yaitu pertama, meningkatnya akses terhadap produk dan perusahaan pertanian asing melalui pengurangan hambatan tarif dan non-tarif serta transparansi peraturan yang lebih baik; kedua, tantangan terhadap sektor produksi biji-bijian Tiongkok yang tidak efisien, dengan dampak yang lebih berat bagi petani dan penduduk pedesaan di wilayah pedalaman yang kurang berkembang.

Tahap baru Tiongkok dalam perdagangan dan investasi internasional dimulai pada tahun 2001 ketika Tiongkok bergabung dengan WTO. Tahapan ini di tandai dengan diperluasnya lahan dagang dan investasi bagi investor asing di Tiongkok (John dan Doris Naisbitt , 2010, p. 159). David Scott dalam *Jurnal of World System Research*, menyampaikan bahwa meningkatnya perdagangan Tiongkok dengan dunia meningkat dengan signifikan. Pada tahun 2001, perdagangan Tiongkok dengan dunia mencapai \$23 miliar dan di tahun 2007 mencapai \$262 miliar (David Scott, 2008).

Hingga tahun 2008, perdagangan Tiongkok mencapai \$2,5 triliun (John dan Doris Naisbitt, 2010).

Pada awal bergabungnya Tiongkok dalam keanggotaan WTO pada tahun 2001 merupakan langkah awal Tiongkok untuk melakukan transisi yang diartikan sebagai komitmen Tiongkok di dalam WTO yang juga merupakan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan Tiongkok di dalam maupun luar negeri. Adapun dampak dari penyesuaian di atas bisa kita lihat dalam jurnal *Economic Outlook for East Asia* yang menjelaskan tentang pertumbuhan PDB Tiongkok.

**Tabel 3.2. Proyeksi Pertumbuhan PDB dan Inflasi Tiongkok, 2002-2004**

Pertumbuhan PDB (nilai nyata)			Tingkat Inflasi (diukur dengan PDB Inflator)		
2002	2003	2004	2002	2003	2004
8,0	8,6	8,5	-0,3	1,0	1,1

Sumber: (Institute of Developing Economies, 2003).

Pada tahun 2002, pertumbuhan PDB Tiongkok mencapai angka 8%. Bahkan untuk pertama kalinya, Tiongkok menjadi negara dengan menerima FDI terbesar di dunia. Kenaikan pertumbuhan di tahun 2003 sebesar 8,6% merupakan peningkatan yang terjadi akibat konsumsi yang meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2004 juga menjadi tahun dimana angka pertumbuhan Tiongkok diperkirakan akan meningkat sebesar 8,5%. Hal ini diakibatkan oleh tingginya permintaan domestik sebagai lanjutan dari tahun 2003. Perkiraan peningkatan pertumbuhan ini berdampak pada tekanan inflator hingga mencapai 1,1%.

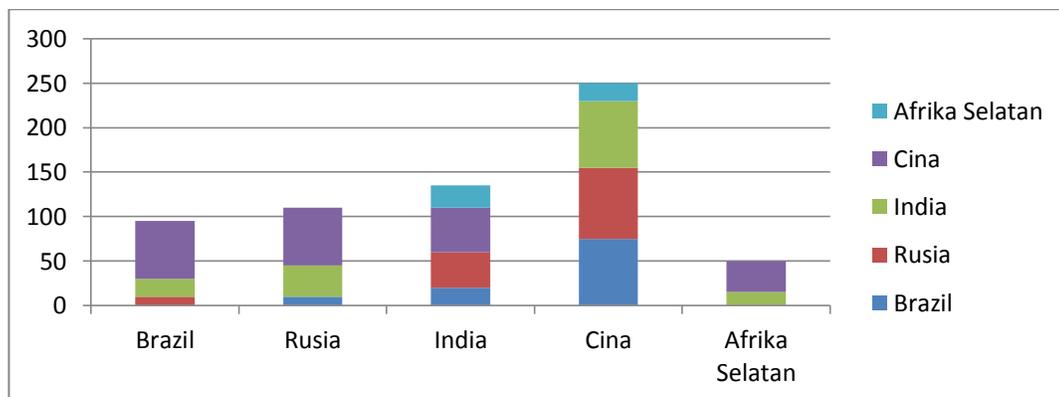
### 3. Pengaruh Tiongkok dalam BRICS

Tiongkok merupakan salah satu dari negara yang melakukan kerjasama bilateral dengan banyak negara di dunia maupun masuk sebagai anggota bahkan pencetus berdirinya organisasi dan Bank besar dunia seperti AIIB. Oleh sebabnya dengan keberadaan Tiongkok dalam keanggotaan BRICS tidak megagetkan lagi. BRICS sendiri merupakan sebuah organisasi yang dicetuskan oleh Goldman Sachs pada tahun 2001 yang keanggotaannya terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

Kekuatan Tiongkok dalam hal ekonomi perdagangan sangatlah mengagumkan. Diantara seluruh anggota BRICS, Tiongkok terbilang sebagai negara yang paling dominan dalam perdagangan kepada negara anggota.

Dalam data dari *BRICS trade is flourishing and Africa remains a pivot* menunjukkan bahwa Tiongkok sangatlah mendominasi dalam perdagangan terhadap negara anggota BRICS.

**Gambar 3.4 Total Perdagangan Intra-BRICS 2012 (AS \$ miliar)**



Sumber: Simon Freementle dan Jeremy Stevens (2013).

Dalam data diatas pada tahun 2012, Tiongkok merupakan raja dalam perdagangan di organisasi ini. Bahkan seluruh anggota BRICS melakukan kerjasama dengan Tiongkok (Freemantle, Simon dan Jeremy Stevens, 2013).

Keberadaan BRICS yang disini lima negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat ini membuat dobrakan baru terkait deklarasinya perihal akan mendirikan Bank internasional.

Dan alhasil Bank Pembangunan Baru (NDB) yang sebelumnya melakukan perjalanan panjang untuk bernegosiasi dengan anggota-anggota BRICS secara resmi diluncurkan di pada tanggal 21 juli 2015 di Shanghai, Tiongkok. Berdirinya sebuah Bank pembangunan internasional ini bernilai \$100 miliar. Peluncuran NDB dilakukan tidak lama setelah pembentukan *Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB)* yang juga diprakarsai oleh Tiongkok.

Di Bank baru AIIB, Beijing memiliki saham yang terbesar yaitu mencapai 31%. Sementara Tiongkok memberikan kontribusi sama dengan empat negara lainnya yang di gunakan sebagai modal awal sebesar \$50 miliar dalam NDB. Yang kemudian akan ditingkatkan sebesar dua kali lipat. Oleh karenanya Tiongkok diprediksi akan menguasai kedua Bank internasional baru tersebut (voaindonesia, 2015).